

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikuntoro, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rianeka Cipta, 2002).
- Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- \_\_\_\_\_, Menegakan Etika Penyelenggara Pemilu, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- \_\_\_\_\_, Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- \_\_\_\_\_, Perihal Undang Undang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Fajar, mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Haris, Abdurahman, Pengantar Etika Islam, (Sidoarjo: Al-Afkar, 2007).
- Huda, Ni'matul, Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- Ibrahim, Johnny, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang : Bayumedia Publishing, 2011).
- Isnanto, Rizal, Buku Ajar Etika Profesi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009).
- Kusnardi, Mohammad ,dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983)
- Lubis, Suhrawardi K, Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Manan, Bagir, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Cet.III, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005).
- Prihatmoko, Joko J, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

- Prodjohamidjojo, Martiman, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Saleh, Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu, Cet.I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Sardini, Nur Hidayat, Mengeluarkan Pemilu Dari Lorong Gelap: Mengenang Husni Kamil Manik 1975-2016, (Jakarta: Buku Obor, 2017).
- Suswanto, Gunawan, Mengelola Penegak Demokrasi Dibalik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016).
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI-Press, 1986).
- Soemitro, Roni Hanitjo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982).
- Taufik Makarao, Mohammad, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet.I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).

## **Jurnal**

- Ashiddiqie, Jimly, “Pengenalan DKPP untuk Penegak Hukum” Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta Februari 2013
- Darwis, Muhammad Salman, “Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013” Jurnal Konstitusi, Volume 12, Maret 2015.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, “DKPP Siap Bekerja” Newsletter DKPP Edisi III, Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2014.
- Hendri, William, “Tinjauan Yuridis Kewenangan DKPP Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Terhadap Putusan Dkpp Nomor : 23 - 25/Dkpp-Pke-I/2012” Jurnal Selat, Volume 24, Oktober 2014.
- Malik, “Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat” Jurnal Konstitusi, Volume 6 No. 1, April 2009.
- Ramlan, “Efektifitas Penegakan Kode Etik Terhadap Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP” Jurnal Reformulasi Sistem Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP RI, 2016.

Rusli, "Tinjauan Konstitusional Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Pilkada" Jurnal e-katalogis, Volume 3 Nomor 12, 2016.

Septiawan, Rizal Andre, Untung Dwi Hananto, Fifiana Wisnaeni, "Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, Studi Kasus Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Pada Perkara Kode Etik Oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur" Skripsi FH Undip, 2016.

Sinaga, Kariaman, "Efektifitas Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Terhadap Penegakan Integritas Demokrasi Pemilukada" Jurnal Publik Undhar Medan, Volume I, Juli 2016.

Wahid, Abdul, "Peran Mahkamah Etik Dalam Mencegah Kriminalisasi Demokrasi", Jurnal Etika dan Pemilu, Edisi Mei 2015.

Zulkifli, Sulaeman, "Mahkamah Etik Penyelenggara Negara di Negara Demokrasi." Jurnal Etika dan Pemilu, Volume 1, Mei 2015.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Azas Umum Pemerintahan yang Baik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah

#### **Website**

Adhiyudha, Fransiscus, [ini 17 Keputusan DKPP Terkait Pelanggaran Pilkada Periode Oktober 2017 hingga Januari 2018](http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/18/ini-17-keputusan-dkpp-terkait-pelanggaran-pilkada-periode-oktober-2017-hingga-januari-2018), diakses dari Tribunnews.com <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/18/ini-17-keputusan-dkpp-terkait-pelanggaran-pilkada-periode-oktober-2017-hingga-januari-2018>, diakses pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 21:05.